



Judul : Perkuat ketahanan energi, komisi XII dukung kenaikan target PLTS
Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perkuat Ketahanan Energi Komisi XII Dukung Kenaikan Target PLTS

KOMISI XII DPR mendorong pemanfaatan potensi energi surya demi memperkuat kemandirian serta ketahanan energi nasional. Upaya strategis itu diwujudkan melalui peningkatan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) jadi 100 GW hingga 2034. Kebijakan itu masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai, peningkatan target PLTS merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sinar matahari yang melimpah di Indonesia. Kebijakan itu mempertegas arah bangsa dalam menjalankan transisi energi berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen nasional terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Pengembangan energi surya, kata Bambang, jadi pilihan tepat bagi Indonesia yang berkarakteristik negara tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Peningkatan kontribusi PLTS dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional turut membangun sistem energi berkelanjutan. "Itu didukung pasokan cahaya surya harian yang stabil," terangnya, Selasa (18/8/2026).

Dia mengungkapkan, ada perubahan cukup besar dalam sasaran pengembangan PLTS pada RUPTL terbaru. Kapasitas PLTS yang sebelumnya hanya diproyeksikan berada di kisaran 17 GW kini dioptimalkan oleh Pemerintah jadi 100 GW

hingga 2034. Lompatan target ini menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi energi bersih.

Peningkatan target itu sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk terus memperluas pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Momentum peringatan kemerdekaan harus jadi dorongan bagi bangsa agar semakin mandiri memenuhi kebutuhan energi. Penggunaan potensi sumber daya dalam negeri diharapkan mampu mewujudkan ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan PLTS membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik di lapangan juga dukungan regulasi agar proses transisi energi dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. "Tanpa payung hukum yang memadai, percepatan pemanfaatan sinar matahari tidak akan mampu berjalan secara optimal serta terarah," ujarnya.

Komisi XII DPR bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, lanjutnya, berkomitmen terus mengawal penyusunan sejumlah regulasi strategis di sektor energi nasional. Beberapa perundangan itu mencakup RUU EBT serta RUU Minyak dan Gas Bumi. Aturan hukum itu disiapkan demi memberikan kepastian investasi transisi energi.

Proses legislasi RUU EBT kini masih terus berjalan sesuai dengan mekanisme resmi yang berlaku di DPR. Pembahasan RUU itu secara intensif sedang berlangsung di Baleg. ■ PYB